BULETIN OKTOBER 2014

LEMBAGA PERS MAHASISWA
MERCUSUAR
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kritis, Kreatif, Konsepsional

PARKIR OVERLOAD

MASALAH BARU DI TAHUN AJARAN BARU

Bertambahnya jumlah mahasiswa tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai, pembangunan di beberapa tempat juga semakin menambah pelik masalah.

Foto: Mercusuar/pci

Di tahun ajaran baru 2014-2015 ini mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) khususnya di kampus A dan B dihadapkan oleh permasalahan baru. Banyak mahasiswa kesulitan untuk mendapat lahan parkir. Kampus yang semakin sesak dengan bertambahnya mahasiswa membawa konsekuensi pula pada jumlah kendaraan masuk yang tidak terkontrol, ditambah hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang keluar (lulus). Akibatnya banyak mahasiswa merasa tidak nyaman karena tempat parkir menjadi sering *overload*.

Ketika memasuki kawasan kampus B misalnya, akan banyak terlihat tanda parkiran penuh sehingga motor ataupun mobil terpaksa diparkir di jalan-jalan dan trotoar, bahkan seringkali mahasiswa tidak mendapatkan parkir, sehingga harus memarkirkan kendaraannya di luar kampus. Dini, mahasiswi FISIP yang kesehariannya menggunakan mobil untuk pergi ke kampus mengatakan pernah mengelilingi kampus sebanyak tiga kali namun tetap tidak mendapatkan parkir sehingga harus memarkirkan mobilnya di salah satu mall terdekat. “Sekarang itu udah macet, keliling nyari parkir udah 15 menit sendiri, muter tiga kali tetep nggak dapat parkir”,ujarnya.

Pengguna sepeda motor di kampus B juga mengalami masalah yang sama. Seperti yang dialami Faisal Rizky, mahasiswa FEB. Ia merasa kesulitan untuk mencari parkir terutama pada jam-jam padat pukul 9 atau 10 pagi. Bahkan seringkali ia harus mencari parkir di luar fakultasnya sendiri. "Tidak jarang kampus di FEB parkirnya di FISIP atau FIB, malah yang lebih mengenaskan higga mencari parkiran di Graha Amerta" keluhnya.

Bukan hanya pengguna kendaraan yang merasa terganggu oleh masalah perparkiran di Universitas Airlangga, banyak pula pejalan kaki yang merasa terganggu dikarenakan trotoar seringkali dijadikan tempat parkir *dadakan*. Trotoar didepan Fakultas Hukum (FH) yang biasa digunakan mahasiswa pedestrian kini telah beralih fungsi menjadi lahan parkir. Belum lagi lahan parkir FH yang sebagian dialih fungsikan untuk pembangunan lift semakin memperparah keadaan parkir di FH.

Hal sama juga terjadi pada trotoar sebelah utara Fakultas Ilmu Budaya menuju perumahan dosen. Trotoar yang sebelumnya digunakan sebagai akses menuju kantin “Pujasera” FIB, kini sesak dipenuhi oleh motor, sehingga seringkali mahasiswa yang hendak membeli makanan di FIB terganggu dengan keadaan trotoar. Kepadatan tersebut dimulai menjelang jam 10.00 hingga 16.00 sore, yakni dimulainya jam kedua perkuliahan hingga berakhirnya jam ketiga.

Kondisi di Kampus A Universitas Airlangga tidak jauh berbeda dengan kondisi di Kampus B. Meskipun tidak sama parahnya dengan kondisi di Kampus B, banyak mahasiswa yang berada di Kampus A mengeluhkan lahan perparkiran yang semakin sesak. “Ini nggak karuan. Biasanya motor masih dapet parkir, ini nggak,” ujar Dea, Mahasiswi semester tujuh Fakultas kedokteran Gigi. **(lanjut ke hal 16 ...)**

LEMBAGA PERS MAHASISWA
MERCUSUAR
UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kritis, Kreatif, Konsepsional

Susunan Redaksi

Pelindung : Rektor Universitas Airlangga
Penasehat : Wakil Rektor 1 Universitas Airlangga
Pemimpin Umum : Ahmad Fahri H
Wakil Pimpinan Umum : M. Aufal F
Pemimpin Redaksi : Rizka Perdana Putra
Wakil Pimpinan Redaksi : Ahalla Tsauro
Ketua Litbang : Rizki Ridha Damayanti
Wakil Ketua Litbang : Okky Wisnu W
Editor : Chusnul Chotimmah
Layouter : Prisca Cindy, Muchibudin Abas, Adien Guarta
Fotografer : Prisca Cindy
Reporter : Vijai Indoputra, Shinta Dwi A, Nikki Samuasa, Henydria Dwi A, Ahalla Tsauro, Rizka Perdana Putra

LPM Mercusuar Unair
@mercusuar_unair

Pengantar Redaksi

Salam Pers Mahasiswa

Masalah parkiran menjadi masalah yang banyak diperbincangkan mahasiswa Unair di tahun ajaran baru 2014-2015 ini. Baik ketika di kampus saat kegiatan belajar mengajar ataupun di media sosial banyak mahasiswa yang mengeluhkan semakin sempitnya lahan parkir yang tersedia. Menyadari masalah yang sifatnya urgent tersebut buletin Mercusuar edisi Oktober 2014 hadir dengan topik utama membahas masalah lahan parkir yang semakin sempit.

Dimulai dengan sorotan utama mengenai masalah parkiran kami mencoba melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian rubrik opini juga menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya mengenai masalah lahan parkir yang makin sempit. Kami juga menghadirkan liputan tentang Diskusi Publik yang diadakan LPM Mercusuar terkait masalah fasilitas kampus. Dari diskusi tersebut LPM Mercusuar mengajak seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam mengatasai permasalahan yang ada. Selain itu kami juga menyoroti pelaksanan bidik misi pada tahun ini yang mengalami beberapa perubahan. Kemudian berita tentang KIPEM dan PIMNAS juga kami tampilkan di buletin edisi Oktober ini.

Kami berharap dengan adanya buletin Mercusuar ini akan menghidupkan pemikiran kritis, kreatif, dan konsepsional di kampus Unair. Tidak hanya memberi informasi dan wawasan tetapi juga pendidikan dan kontrol sosial sehingga benar-benar menjalankan fungsi pers seperti seharusnya. Akhir kata, selamat membaca dan menikmati buletin Mercusuar edisi Oktober 2014 ini.

Selamat membaca

Redaksi

Tahun Ajaran Baru, Permasalahan "Baru"?

Gambar: http://cartoonistsatish.blogspot.com

Beranjak ke tahun ajaran baru 2014, Universitas Airlangga kembali dihadapkan pada permasalahan lama. Belum berkaca pada masa lalu, lahan parkir di beberapa lokasi kampus A dan B kembali mengalami *overload* karena tidak seimbangnya volume kendaraan yang masuk dengan ketersediaan lahan parkir. Kisaran seminggu kegiatan perkuliahan bergulir sejak tanggal 1 September lalu, parkiran sudah sesak bahkan di jam-jam pagi, mahasiswa sudah sibuk mencari lahan parkir terkadang juga merepotkan petugas parkir antar fakultas.

Fenomena ini utamanya terjadi setelah resminya mahasiswa baru (maba) menggunakan fasilitas parkir. Terlihat di areal kampus B yang memang disekitar lahan parkirnya sedang dilaksanakan proyek pembangunan seperti Syariah Tower mengalami dampak yang signifikan pada alokasi lahan parkir. Ada beberapa fakultas di kampus B seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Psikologi (FPsi), Fakultas Hukum (FH) di kampus B yang terkena dampak dari menipisnya lahan parkir. Tidak ada parkiran khusus moda roda empat, membuat kadang tidak ada batasan jelas tiap areal fakultas.

Digadang sebagai *World Class University*, kredibilitas Unair kemudian patut dipertanyakan kembali mengingat ketersediaan sarana prasarana seperti parkir saja masih kurang memadai. Jumlah mahasiswa yang terus bertambah seharusnya juga sudah diantasipasi dengan penyediaan sarana prasarana yang terus meningkat. Dengan begitu mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh dalam kegiatan perkuliahan, tidak terganggu dengan permasalahan lahan parkir. Tentunya mahasiswa kemudian mengharapkan adanya perubahan yang berarti mengingat biaya perkuliahan yang dikeluarkan juga tidak sedikit, terlebih dengan adanya sistem UKT yang dirasa lebih memberatkan.

--

Ada beberapa hal yang perlu disorot sebagai pokok permasalahan sempitnya lahan parkir di kampus B Unair. Pertama, penerimaan mahasiswa baru yang semakin besar secara kuantitas tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sarana prasarana dasar seperti lahan parkir. Diperkirakan ada penambahan kuota untuk maba sekitar 1000 orang tiap tahunnya, sementara lahan parkir tidak kunjung bertambah. Belum lagi proporsi mahasiswa baru yang masuk dengan mahasiswa tingkat akhir yang keluar tidak sebanding, mau tidak mau *sharing* fasilitas seperti parkir tidak terhindarkan.

Selanjutnya penting juga untuk disoroti fenomena mahasiswa yang berdomisili cukup jauh dari daerah kampus. Hal ini mengakibatkan mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi dengan porsi satu orang mahasiswa menggunakan satu kendaraan roda empat. Hal ini mengakibatkan *space* parkir semakin tidak efektif. Lalu keterbatasan lahan parkir yang memang harus berurusan dengan pembebasan tanah jelas mempersulit solusi praktis perluasan lahan parkir di Universitas Airlangga. Sehingga dapat dimaklumi dengan kedua ketidakseimbangan ini, *overload* parkiran jelas tidak terelakkan.

Kemudian adanya parkir komersil (khususnya di lapangan depan Magister Manajemen) di kampus juga semakin menambah pelik segmentasi lahan parkir. Memang untuk masalah ini sudah disiasati dengan pemberlakuan biaya parkir bagi pengguna *non-member*. Namun pada kenyatannya hal ini belum mampu mengatasi. Terbukti dari data yang coba dihimpun Mercusuar dari pihak *Secure Parking* pada tanggal 8 September 2014 terdapat 189 mobil umum dari 535 mobil yang parkir hari itu. Yang berarti ada sekitar 35% presentase mobil umum yang parkir di depan MM. Pada minggu berikutnya (15/9) presentase mobil umum adalah 27% dan 28% pada (22/9). Angka mendekati sepertiga ini juga cukup membebani.

Selanjutnya pembangunan lift di fakultas Hukum dan fasilitas lain di kampus B seperti Syariah Tower kedepannya memang akan berdampak positif bagi kampus, namun demikian prioritas pembangunan tersebut harusnya memiliki *timeline* yang jelas sehingga tidak merugikan kepentingan umum seperti mempersempit lahan parkir. Lalu kebijakan universitas untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi beroda empat khususnya bagi mahasiswa semester 1 sampai 4 menjadi tidak efektif karena belum memiliki manajemen kontrol yang konsisten, sehingga acap kali harus kecolongan. Mobilitas transportasi khusus kampus, bus FLASH, juga dirasakan belum solutif dikarenakan jam operasional yang tidak cukup mampu mengakomodir kebutuhan mahasiswa secara menyeluruh dan jangkauannya yang terbatas.

Kondisi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan saja oleh mahasiswa dan juga rektorat dan hanya dijadikan sebagai tradisi kewajaran "asal kelakon" (asal jalan). Sudah seharusnya setiap fakultas mempunyai kapabilitas parkir untuk menampung mahasiswanya sendiri, bukan *sharing* parkir yang menyita waktu mahasiswa setiap jadwal perkuliahan berlangsung. Pihak rektorat universitas seharusnya memikirkan lebih lanjut soal besaran kuota masuk maba berbanding dengan peningkatan fasilitas dasar.

Dari diskusi yang dilakukan internal Mercusuar kami mengajukan beberapa solusi. Pertama yang paling penting adalah perlu adanya kesadaran kolektif baik dari mahasiswa maupun rektorat. Langkah yang bisa dilakukan setidaknya melarang parkir komersil di depan MM. Kuota sekitar 100an mobil umum digantikan dengan parkiran khusus mahasiswa akan sangat membantu. Kemudian ide untuk melakukan *car free day* seminggu atau sebulan sekali bagi seluruh elemen Unair juga setidaknya akan menyadarkan mahasiswa dan dosen pengguna kendaraan bermotor. Hal ini perlu dibiasakan mengingat sejalan dengan salah satu program Unair akhir-akhir ini yaitu mewujudkan *Eco Campus*. Dalam jangka panjang, pembangunan parkir bertingkat juga diperlukan untuk mengantisipasi kendaraan bermotor yang semakin banyak. Ketika pembangunan lahan parkir ini tidak segera direalisasikan maka hendaknya Unair juga tidak menerima penambahan kuota mahasiswa baru mengingat sarana prasarana dasar seperti parkir saja belum terpenuhi. **(nki,rpd)**

Redaksi Mercusuar Unair menerima tulisan berupa Opini dan juga Karya Sastra (puisi,prosa, dll).
Kirimkan hasil karya anda ke mercusuar.unair@gmail.com

Diskusi Publik Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mercusuar Universitas Airlangga

APA KABAR FASILITAS KAMPUS?

LPM Mercusuar Unair telah mengadakan Diskusi Publik membahas kesiapan fasilitas Unair pada Jumat 26 September 2014 lalu.

Diskusi yang berlangsung di gedung Pinlab lantai 2 ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas. Sebagai pembicara, LPM Mercusuar menghadirkan Bustomi, Menteri Kebijakan Publik BEM Unair 2010, dan Yoeka Firike, Ketua BEM FIB UA Tahun 2012.

Diskusi ini sendiri diadakan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk dapat menyampaikan argumentasi kritisnya. Hal ini mengingat minimnya diskusi yang sifatnya terbuka di lingkungan Unair. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Fahri Huseinsyah, Pimpinan Umum LPM Mercusuar pada saat sambutan diskusi, "Di Unair ini kita memerlukan adanya forum diskusi yang kontinu, konsisten, dan kritis untuk isu-isu yang bisa dibilang 'sexy' seperti masalah fasilitas kampus, utamanya mengenai lahan parkir seperti ini". Lebih lanjut ia mengharapkan melalui diskusi ini dihasilkan *output* berupa solusi konkrit, dan yang lebih penting semua mahasiswa secara bebas dapat menyampaikan aspirasinya tidak terkesan diam dan apatis.

Diskusi kemudian dimulai dengan pemaparan dari Yoeka Firike. Ia menyoroti jumlah mahasiswa yang terus bertambah tanpa diimbangi oleh peningkatan fasilitas. Salah satunya adalah masalah tempat parkir. Yoeka mengungkapkan bahwa pada tahun 2011 ketika ia masih menjadi Menkominfo BEM FIB masalah parkir pernah terjadi. Pada saat itu mahasiswa di Fakultas FIB kesulitan untuk parkir karena adanya pemindahan lokasi Fakultas Psikologi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan tentang status lahan parkir di tiap fakultas. Apakah lahan parkir tersebut milik tiap fakultas atau milik bersama.

Melihat kondisi yang demikian, Yoeka memutuskan untuk melakukan dialog dengan pihak birokrat fakultas dan rektorat. Akhirnya keputusan yang didapat adalah tidak ada lagi lahan parkir fakultas, yang ada adalah lahan parkir universitas sehingga Mahasiswa Universitas Airlangga dari fakultas manapun berhak untuk parkir di fakultas manapun. Akan tetapi dalam realitasnya, tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Pada tahun 2012 saat Yoeka terpilih sebagai Ketua BEM FIB, Yoeka semakin ingin mempertanyakan kondisi fasilitas di Universitas Airlangga. Akhirnya Yoeka melakukan mediasi kepada pihak rektorat dengan berkoordinasi bersama Organisasi mahasiswa (Ormawa) fakultas dan universitas. Akan tetapi, yang sangat disayangkan saat akan membicarakan permasalahan ini ke pihak rektorat, ormawa universitas terlihat berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya ormawa yang bergerak secara parsial ini akhirnya tidak dapat melakukan tekanan yang kuat kepada pihak rektorat.

Dalam upaya menyelesaikan masalah fasilitas kampus yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa, Yoeka mencoba memberikan sebuah komparasi antara kondisi di Universitas Airlangga dengan di Universitas Malaya, Malaysia. Ia mengungkapkan bahwa salah satu cara yang digunakan Universitas Malaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC)

adalah memangkas kuota mahasiswa baru sebanyak 50% setiap tahun dan dan juga semakin menambah fasilitas yang ada di kampus.

Melihat kondisi Universitas Airlangga sekarang ini, Yoeka menjadi teringat dengan kata-kata salah satu dosen sejarah di FIB yakni Bapak Sarkawi "Indonesia nggak terlalu banyak membutuhkan sejarawan. Kita butuh sejarawan yang *real*, *the real* sejarawan, bukan sejarawan yang sejarah-sejarahan. Penambahan kuota mahasiswa bukanlah hal yang salah, yang salah adalah apabila penambahan mahasiswa tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas fasilitas yang ditawarkan oleh kampus itu sendiri. Sekarang, dosen saja terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak ini. Itu pasti akan mempengaruhi kualitas akademis dari mahasiswa."

Kebijakan yang dilakukan Univeritas Malaya harusnya bisa juga dibuat oleh Universitas Airlangga. Di Universitas Airlangga, setiap tahunnya jumlah kuota mahasiswa baru ditambah dan tidak diimbangi dengan *progress* peningkatan fasilitas yang berimbang. Hal tersebut akan berpengaruh pada kegiatan akademis dan kegiatan mahasiswa lainnya, seperti di FIB dan FEB mahasiswa harus berebut kuota mata kuliah saat KRS, dan di FEB banyak jadwal antar mata kuliah yang akhirnya bentrok, di FISIP mushola tergusur karena pembangunan salah satu gedung, selain itu terkadang mahasiswa sering terlambat masuk kelas karena kesulitan mencari tempat parkir.

Menurut Yoeka kondisi kampus yang kurang diimbangi dengan fasilitas yang memadai juga diperparah dengan kondisi mahasiswa itu sendiri di mana dari tahun ke tahun gerakan mahasiswa cenderung turun. Ormawa-ormawa yang ada di kampus juga kurang melakukan sosialisasi mengenai fasilitas dan kondisi yang ada di kampus kepada mahasiswa baru. Mahasiswa seperti sudah nyaman dan terlena dengan fasilitas dan predikat Universitas Airlangga sebagai World Class University. Dampaknya, karena kurang adanya kontrol dari mahasiswa mengenai kondisi fasilitas kampus, maka pihak birokrat kampus cenderung sangat leluasa dalam membuat kebijakan. Yoeka sangat menyayangkan apabila mahasiswa hanya diam ketika menghadapi permasalahan di lingkungannya sendiri. Sikap diam mahasiswa menunjukkan bahwa predikat mahasiswa sebagai kontrol sosial dan *agent of change* hanyalah sebuah label semata.

Selain itu Bustomi juga berpendapat tentang perlunya koordinasi ormawa untuk menyelesaikan masalah kampus. Ia menganalogikan kampus sebagai *mini state* di

Foto: Mercusuar/PC

Suasana diskusi "Apakabar Fasilitas Kampus?"

mana universitas adalah sebuah negara. Setiap kampus mulai dari kampus A sampai D adalah sebagai provinsi dan fakultas adalah sebuah kabupaten/kota. Setiap tingkatan di negara tersebut tentu memiliki pemerintahan masing-masing seperti misalnya BEM Fakultas, HIMA Prodi dan ormawa lainnya. Keseluruhan tingkatan tersebut harus saling berkoordinasi dan melakukan konsolidasi terkait penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.

Khusus mengenai permasalah lahan parkir penuh, Bustomi mengatakan bahwa ada tiga penyebab utama. Yang pertama adalah lahan yang terbatas, kedua adalah kendaraan yang semakin bertambah, dan yang ketiga adalah jumlah wisudawan yang sedikit. "Berbicara tentang tempat parkir berarti berbicara tentang kontur geografis dan *space*." "Jika *space* terbatas dan kuota mahasiswa terus ditambah tentu hal tersebut terlihat seperti pola pikir kapitalistik."ujarnya.

Ia kemudian mengemukakan salah satu solusi untuk mengurangi kepadatan kendaraan tersebut. Salah satunya adalah bersepeda ke kampus. Cara ini sudah dilakukan mahasiswa di universitas-universitas di Thailand yang biasanya berangkat ke kampus bersama-sama dengan menggunakan sepeda. Ia mengharapkan hal itu bisa diterapkan di Universitas Airlangga. Misalnya dengan menyelenggarakan "*gowes* ke kampus" secara serentak. Kegiatan ini selain mengurangi kepadatan kampus, melaksanakan *go green*, juga dapat menumbuhkan citra positif untuk Universitas Airlangga ketika diliput media. "Kalau *pengen* citra bagus dan bikin rekor muri *nggak* perlu repot, cukup menyelenggarakan gerakan gowes ke kampus secara serentak." ujar Bustomi

Selain itu, Bustomi juga membandingkan dengan kebijakan yang ada di Kyung Hee University, Korea Selatan. Di sana mahasiswa yang membawa mobil harus rela membayar biaya parkir dengan harga mahal. Selanjutnya menurut Mas Bustomi, mahasiwa juga harus bisa menempatkan diri sesuai dengan predikat yang diberikan kepada Universitas Airlangga sebagai Peraih Juara 5 dalam Pimnas, *The Big Five University* dan sebagai *World Class University* serta sebagai universitas yang mencoba untuk menjadi kampus *research*.

Dengan predikat yang demikian, mahasiswa juga harus menemukan solusi dari sebuah permasalahan dengan cara pikir yang ilmiah dan logis. Seperti misalnya untuk masalah fasilitas kampus, antara mahasiswa eksak dan non eksak bisa saling bekerja sama melakukan riset sederhana yakni mahasiswa eksak melakukan riset tentang fasilitas kampus secara kuantitatif dan mahasiswa non eksak melakukan riset secara kualitatif.

Data-data tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan tingkatan per universitas seperti yang telah disebutkan di awal, yakni melalui fakultas, hima dan kemudian per angkatan di setiap prodi. Dengan cara yang demikian, maka akan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan tidak bersifat parsial. Dengan data-data tersebut selanjutnya keseluruhan ormawa dalam setiap jenjang dapat melakukan dialog kepada pihak universitas, sehingga mahasiswa tidak hanya menyuguhkan kritikan, akan tetapi juga dapat memberikan solusi berdasar. Dengan demikian mahasiswa memiliki *bargainning position* yang sangat bagus, dan *bargainning position* juga bisa dinaikkan dengan pemanfaatan peran media massa dan sosial media.

Dari dialog yang berjalan interaktif ini kemudian dapat terlihat masih banyak kekurangan fasilitas yang ada di Universitas Airlangga, seperti laboratorium FKH yang kurang memadai, bocornya atap SC Situs FIB, kuota kelas mata kuliah untuk mahasiswa FEB, akses perpustakaan yang semakin menurun mulai dari jadwal tutup perpustakaan sampai akes ruang diskusi serta batas maksimal peminjaman buku, akses jurnal dan wifi yang kurang, serta nasib mahasiswa vokasi yang masih harus direpotkan dan dibingungkan saat pengurusan masalah administratif.

Dari diskusi publik ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara komprehensif oleh seluruh jajaran oramawa di Universitas Airlangga. Ormawa tidak boleh bekerja sendiri secara parsial, gebrakan baru bisa dirasakan apabila ada konsolidasi antara ormawa dari setiap tingkatan di Universitas. Mahasiswa juga harus menunjukkan fungsinya sebagai kontrol sosial yang tidak hanya diam saat melihat permasalahan, akan tetapi dapat melakukan dialog dan gerakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan. "Mahasiswa harus memiliki keberanian berpendapat dan tidak hanya diam saat melihat masalah di lingkungannya."ujar Yoeka.

Sebagai penutup, satu harapan diungkapkan Bustomi untuk seluruh mahasiswa Unair "Tumbuhkan semangat literasi, perkaya referensi, tingkatkan intensitas diskusi supaya kamu mampu menemukan apa itu substansi, sehingga kamu mampu menemukan solusi, dan akhirnya kamu bisa menyatakan ini diri!" **(shn)**

BIDIK MISI

Bukan Beasiswa Untuk Rakyat Miskin Tanpa Prestasi

Pelaksanaan program bantuan beasiswa bidik misi sudah mencapai tahun ke empat sejak 2010. Namun masih terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya

Jumlah penerima beasiswa bidik misi dari tahun 2010 hingga tahun 2013 selalu menunjukkan peningkatan. Dari 500 mahasiswa pada tahun 2010, kemudian 750 mahasiswa pada tahun 2011, 850 mahasiswa pada tahun 2012 dan 900 mahasiswa pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Padahal kondisi yang terjadi adalah semakin meningkatnya permintaan pendidikan khususnya pendidikan pasca Sekolah Menengah Atas dan sederajat.

Mengapa?

Pola perekrutan bidik misi sejak tahun ini juga mengalami perubahan. Sejak awal hingga tahun 2013, pola perekrutan dilakukan dengan sistem kuota. Artinya jika perekrutan yang berasal dari SBMPTN dan SNMPTN masih menyisakan kesempatan untuk menerima, maka pihak universitas akan mencarikan mahasiswa yang berasal dari hasil tes mandiri untuk memenuhi kuota tersebut. Tetapi ini yang menjadi evaluasi dikarenakan cenderung tidak tepat sasaran dan sering memberatkan masalah administrasi karena harus melalui birokrasi kampus yang cukup rumit. Prakuta Wijaya, ketua AUBMO sebelumnya mengatakan, “Tahun 2013 untuk memenuhi kuota 900 sangat *ngoyo*”. Bu Trias juga menambahkan bahwa untuk memenuhi kuota tersebut tidak mudah. Dan banyak yang nekad” (untuk mendaftar melalui jalur mandiri, red).

Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut, sejak tahun 2014 pola perekrutan tersebut diganti dengan yang baru, dengan seleksi yang lebih ketat. Perekrutan yang dimaksud yakni universitas melalukan penyaringan dengan menetapkan standar prestasi bagi mahasiswa bidikmisi melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN. Sehingga tidak terpaut kuota pendidikan yang ditetapkan oleh Dikti. “Yang penting termasuk dalam kriteria bidikmisi yang sesungguhnya” jawab Kuta (panggilan akrab Prakuta).

Perubahan kuantitas ini juga disinyalir mengalami penurunan dikarenakan kekalahan para mahasiswa calon bidik misi di seleksi SNMPTN dan SBMPTN. Karena tanpa melalui jalur tersebut mereka tidak bisa mendapatkan beasiswa Bidik Misi. “Dijadikan seperti itu, supaya ada kesetaraan. Jadi, ngga ada penerima bidikmisi punya keistimewaan sendiri. Jadi memang benar-benar ditarungkan bersama seluruh mahasiswa” ungkap Kuta. Selain itu, dengan sistem yang dikelola Dikti saat ini, dimana data pendaftar langsung masuk ke *database* Dikti, maka pihak universitas tidak mengetahui berapa banyak peserta bidik misi yang masuk melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, sehingga baru diketahui setelah seleksi dilakukan dan peserta yang lolos diumumkan, sehingga universitas tidak bisa berbuat apa-apa.

Bu Trias sendiri berpendapat dengan halus tentang perubahan kuantitas tersebut, “mungkin kemampuan akademik mahasiswa itu sekarang sudah beralih ke universitas yang lain lagi.”

Perubahan Sistem

Sistem penyaluran dana bidik misi juga mengalami perubahan dari tahun tahun sebelumnya. Pada tahun 2010-2012, sistem penyaluran biaya pendidikan dilakukan dengan subsidi silang dengan skema distribusi otomatis dari mahasiswa yang memiliki besaran SPP rendah ke mahasiswa yang memiliki besaran SPP yang lebih tinggi. Sisanya digunakan untuk biaya pembinaan beberapa keperluan lain seperti biaya penunjang pendidikan misalnya uang buku, biaya KKN (Kuliah Kerja Nyata), biaya wisuda, biaya asuransi, biaya bantuan skripsi, TA (Tugas Akhir) maupun penelitian serta biaya pembinaan seperti *outbond*, TOEFL, hingga beberapa kegiatan

yang melihatkan mahasiswa sebagai subjeknya seperti kepanitiaan Sambut Maba (Samba) hingga studi Visit

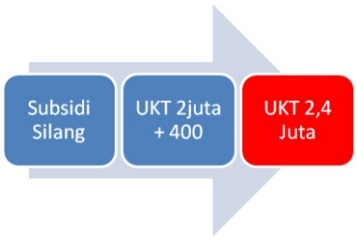

Kemudian, terkait dengan perubahan pola pembayaran menjadi Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) pihak universitas kemudian mematok 2 juta sebagai biaya pendidikan bagi setiap mahasiswa bidik misi, dengan memberikan 400 ribu sebagai biaya pembinaan yang diberlakukan sejak tahun 2013. Sementara pada tahun 2014, pihak universitas kemudian menetapkan 2,4 juta untuk biaya pendidikan. "Sementara untuk biaya pembinaan akan dicarikan. Karena belum ada kepastian untuk alokasi pendanaan. Namun akan tetap diusahakan karena dana 2,4 juta cukup besar ya.." ungkap Fatihin ketika diwawancarai Senin (22/9). Oleh karena itu, penerima bidikmisi di Universitas Airlangga mendapat kategori sendiri, yakni UKT VII dengan nilai 2,4 juta/semester.

Siapa yang menerima?

Siapa yang berhak menerima Beasiswa Bidik Misi sering menjadi wacana di lingkungan mahasiswa. Karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar miskin seperti yang dimaksudkan sehingga seringkali menimbulkan Kecemburuan Sosial. Staf Rektorat kemahasiswaan Universitas Airlangga, Bu Trias, menyatakan spektrum mahasiswa seperi bagan disamping ini.

Logika yang dimungkinkan dalam penerimaan beasiswa Bidik Misi di Universitas Airlangga adalah mahasiswa yang miskin namun bukan mahasiswa yang tidak berprestasi. Mereka yang bergabung sudah harus menunjukkan kempuannya dengan cara lolos tes SBNMPTN, yang oleh universitas Airlangga digunakan sebagai indikator awal prestasi mahasiswa. Setelah itu, baru mereka layak dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa bidikmisi, dengan syarat awal melengkapi persyaratan administrasi. "Jadi mereka yang berprestasi dulu, baru persoalan kemiskinannya mengikuti" seru Bu Trias.

Menanggapi logika yang diterapkan oleh Airlangga, Prakuta Wijaya menyayangkan hal tersebut. Pasalnya logika yang ditawarkan tidak sesuai dengan prinsip universitas sebagai lembaga pendidik, yang tujuannya mencerdaskan yang kurang cerdas. "Aku beranggapan bidik misi itu memberikan kesempatan (mengenyam) pendidikan kepada orang-orang miskin. Nah dia akan berprestasi akhirnya. Kan kayak gitu? Seperti itu pernah saya tantang, gimana kalau IPK teman-teman 2013 dibandingkan dengan IPK 2011? Tapi sampai sekarang, aku masih belum ngerti realisasinya" ujar mahasiswa 21 tahun tersebut.

Bu Trias juga menambahkan bahwa ada mekanisme bagi mereka yang diterima lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN untuk mendapatkan bantuan diluar bidik misi, dengan alasan tidak dicatat oleh sekolah, tidak tahu informasinya, dsb."Saya suruh langsung nulis surat ke rektor dengan tembusan Direktorat Kemahasiswaan" ujarnya. Pasalnya ada rasa takut untuk membantu mahasiswa yang mengajukan bidikmisi akan menyalahi aturan bila tidak mendapat arahan langsung dari pimpinan.

Permasalahan lain

Selama proses penyeleksian siapa saja yang layak menerima bidik misi, terkadang terjadi anomali, padahal persyaratan sudah demikian jelas. Ada mahasiswa yang mendaftar, tapi ternyata setelah disurvey, ternyata punya usaha dagang. "Jadi dari hasil verifikasi itu terindikasi sekitar 20 lebih yang kaya. Kita datangi. Ternyata kedatangannya, disana itu punya usaha. Usaha pun *ndak* kecil. Punya SIUP lho" ujar Pak Wahyu selaku bagian kemahasiswaan universitas Airlangga.

Ketika ditanya mengenai perlunya sanksi untuk mereka yang melakukan pemalsuan data, Pak Wahyu berpendapat masih terlalu kejam jika dikeluarkan dari kampus. "Kalau dikeluarkan itu, saya tidak bisa meluruskan, bukan wilayah saya. Tapi selama ini saya mengelola bidikmisi belum ada yang dikenakan sanksi keluar." Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa cukup ditarik haknya sebagai penerima bidik misi dan akan diminta untuk mengembalikan uang yang telah dipakai.

Terkait dengan evaluasi prestasi, mahasiswa bidik misi yang memiliki IPK dibawah 2,5 akan diberikan pembinaan. "Ada sebuah pembinaan yang diketahui orangtuanya bahwa anak ini perlu ditingkatkan prestasinya, juga berkordinasi dengan Dosen walinya." Memang sekadar arahan, namun untuk pembinaan langsung kepada individual, masih akan dipikirkan formula yang harus dipakai. Pasalnya tidak semua mahasiswa mampu aktif mengikuti program atau fasilitas yang diselenggarakan oleh kampus.

Satu lagi yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keterlambatan penerimaan dana. “Saya kira itu sudah menjadi kendala nasional” ujar pak Wahyu, “soalnya ini juga terkait langsung dengan APBN pemerintah” namun akan terus diusahakan untuk mempercepat prosesnya. Dari sisi mahasiswa sendiri sering terjadi keterlambatan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga jika salah satunya terlambat maka akan terlambat pula satu universitas. Kuta sendiri menyatakan bahwa ada kerumitan pada sistem pengelolaan, apakah Bank Mandiri atau Pihak Dikti yang harus dimintai keterangan, masih menjadi pertanyaan. Namun dalam pengurusan AUBMO, terdapat dana kas yang peruntukannya dapat digunakan jika keterlambatan terjadi padahal kebutuhan mahasiswa sudah sangat terjepit.**(vip)**

CATATAN BIDIK MISI UNAIR 2014

Jumlah penerima bidik misi tahun 2014 turun sebesar 23% dari tahun sebelumnya yakni 900 mahasiswa menjadi 698 mahasiswa, sementara jumlah mahasiswa baru mencapai 7000 orang.

Sistem kuota yang sampai tahun 2013 masih dipakai, kini dihapuskan, karena menyebabkan kurang tepat sasaran dan sulit untuk memenuhi kuota.

Perubahan pada jumlah dana untuk biaya pendidikan (2,4 juta/semester)memberikan keluwesan kepada kemahasiswaan untuk mengelola sesuai dengan keperluan mahasiswa, namun memberi ruang pada intransparansi dan penyalahgunaan.

Bilamana ditemukan mahasiswa yang kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang dituliskan di formulir pendaftaran, pihak unair Memberikan sanksi mencabut beasiswa bidikmisi tersebut, namun belum pernah mengambil inisiatif mengelurkan mahasiswa tersebut.

Pun jika ditemukan mahasiswa yang prestasi semester tersebut rendah, dalam arti IPK dibawah 2,5 (dua koma lima), pihak unair belum menerapkan implementasi sistem mentoring namun hanya memberikan arahan dan koordinasi bersama dosen wali.

Masih adanya wilayah tanggungjawab antara birokrasi rektorat, dikti hingga bank, yang sering menyebabkan keterlambatan pencairan dana disamping keterlambatan mahasiswa

Vania Santoso

Mawapres Universitas Airlangga, Mawapres III Tingkat Nasional

Menerima Tanda Kehormatan Presiden Satyalencana Wirakarya di tahun 2010

Passion-in-action with a clear vision
"Dengan adanya *passion*, kita tidak pernah bosan mengerjakan sesuatu, berinovasi, bahkan saat ada masalah pun justru tertantang menjadikannya sebagai peluang"

Memiliki predikat Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) di tingkat Universitas dan Nasional tentu merupakan pencapaian yang luar biasa. Dalam sesi wawancara September (23/9) Vani – sapaan akrab Vania Santoso, peraih kehormatan tersebut– membagikan kiat-kiat sukses menjadi mahasiswa yang berorientasi prestasi.

Passion-in-action with a clear vision, adalah salah satu motto yang ia yakini mengantar jalan suksesnya. "Dengan adanya *passion*, kita tidak pernah bosan mengerjakan sesuatu, berinovasi, bahkan saat ada masalah pun justru tertantang menjadikannya sebagai peluang," tambahnya.

Clear vision berarti memahami minat dan bakat kemudian mengembangkannya secara konsisten agar terbentuk visi dan tujuan kita yang jelas. Aktif mengikuti banyak kegiatan seperti organisasi, lomba, konferensi maupun seminar dengan tujuan yang jelas juga dapat membantu menambah wawasan, perluasan *networking*, dan pengembangan diri sehingga berpotensi meraih prestasi lebih. Menurut Vani, prestasi bukan hanya persoalan predikat, penghargaan ataupun pencapaian yang gemilang. "Penghargaan itu bonus, prestasi yang sesungguhnya adalah saat kita dapat memberikan manfaat nyata yang berdampak positif secara luas," jelas Vani tentang in action.

Melalui proses dan konsistensi, sudah banyak prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswi program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ini. Diantaranya ia pernah mendapat penghargaan tingkat nasional Museum Rekor Indonesia (MURI) di tahun 2005 sebagai aktivis lingkungan dengan metode promosi yang unik, Optimist Marketer Women Champion dari Hermawan Kertajaya – MarkPlus Inc. di tahun 2010, bahkan juga mendapat penghargaan Satyalencana Wirakarya dari Presiden Indonesia di tahun 2010. Di tingkat internasional banyak penghargaan bergengsi didapatnya salah satunya juara 1 Ecopreneurship Award di Hong Kong tahun 2011 dengan grant 4,000 HKD dan online coaching, Medali emas The Best Personal Leadership Project dari McKinsey Company di tahun 2014 dan banyak diundang Kementrian-kementrian untuk pameran produk ekonomi kreatif.

Penghargaan yang ia dapatkan berangkat dari minatnya pada visi yang jelas, kepedulian terhadap lingkungan ditambah keahlian yang ia tekuni di bidang manajemen. Setidaknya ada dua program yang menurutnya ikut membantu Vani semakin berkembang dalam kepedulian lingkungan, yaitu AV Peduli dan Ecopreneurship.

AV Peduli adalah klub lingkungan yang didirikan Vani di tahun 2005 untuk memfasilitasi kepedulian lingkungan generasi muda. Saat itu Indonesia divonis WHO sebagai negara terkotor di dunia. Melalui AV Peduli Vani dan rekan-rekannya dapat menepis vonis WHO dengan menjadi Juara 1 Lomba Lingkungan Internasional yang diadakan UNEP-PBB di Swedia mengalahkan 365 entries dari 47 negara. Pengabdian masyarakat di bidang lingkungan ini juga yang mengantar Vani pada pencapaian di tingkat nasional dengan mendapat Tanda Kehormatan Presiden Satyalencana Wirakarya di umur 19 tahun.

Melalui AV Peduli Vani terus mengembangkan passion pada isu lingkungan dengan program Ecopreneurship. Ecopreneurship adalah sebuah program pemberdayaan sampah dengan sistem pengolahan yan baik sampai menjadi produk inovasi yang siap jual. "Saya melihat bahwa semakin banyak masyarakat yang mengolah sampah, namun sayangnya hasil karya tersebut (khususnya produk daur ulang non-organik) masih kurang marketable karena kurangnya nilai seni dan minimnya akses mereka ke pasar. Oleh sebab itu saya menempuh studi S1 Manajemen untuk bisa mengembangkan bisnis sosial lewat Ecopreneurship dengan menghasilkan inovasi produk upcycle yang fashionable", jelas Vani.

Prosesnya dimulai dari pengumpulan sampah yang telah dipilah (kerjasama dengan warga binaan, warung-warung, sekolah, bank sampah), kemudian sampah dibersihkan, dan diolah kembali lewat pemberdayaan masyarakat baru kemudian dijual secara langsung lewat pameran dan toko. Vania berharap kedepannya Ecopreneurship dapat memiliki national representatives sehingga penjualan dan pemberdayaan masyarakat menjadi luas, juga produknya dapat ditemui di berbagai dept. Stores nasional hingga internasional kerena sejauh ini penjualan masih bersifat sederhana ke end-user langsung.

Dengan prestasi dan kontribusinya, Vani berpesan bahwa semua orang, berapapun usianya bisa menjadi *agent of changes*. Dengan selalu mengingat bahwa kita harus mengutamakan kontribusi, menebar manfaat yang nyata baru kemudian meraih prestasi yang datang sebagai bonusnya. Kemudian tidak lupa selalu berterimakasih terhadap pihak-pihak yang sudah terlibat dalam usaha kita, keluarga, teman, kampus dan masyarakat. **(nki,vip)**

Unair Menuju Pimnas ke-28

Foto: Mercusuar/pci

Penurunan peringkat Unair di Pimnas 27 tidak boleh dibiarkan begitu saja. Berbagai usaha dan kebijakan untuk perbaikan sudah dimulai dari sekarang.

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) merupakan puncak kegiatan ilmiah mahasiswa yang diselenggarakan rutin oleh Direktorat Jendral pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti). Pimnas ke-27 yang diadakan di Universitas Diponegoro (9/2014) menempatkan Universitas Airlangga pada posisi *kelima* dengan perolehan empat emas, enam perak, dan dua perunggu.

Capaian tersebut terbilang menurun dari capaian sebelumnya, dimana Universitas Airlangga mampu menempati peringkat *kedua* setelah Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di urutan *pertama*. Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi Universitas Airlangga untuk memperbaiki prestasi pada Pimnas selanjutnya.

Direktur Kemanasiswaan Universitas Airlangga, Drs. Eko Supeno, M. Si di tahun 2014 ini membuat kebijakan baru untuk meningkatkan antusisasme mahasiswa dalam membuat PKM. "Untuk tahun 2014 ini, mahasiswa baru semuanya diwajibkan membuat PKM sebagai syarat kelulusan," Ujarnya saat ditemui di Rektorat Universitas Airlangga rabu lalu (18/9).

Kebijakan ini ditujukan agar PKM tidak hanya didominasi oleh mahasiswa eksak, namun juga mahasiswa non eksak. Ini penting untuk menumbuhkan atmosfir menulis pada mahasiswa Universitas Airlangga. Dengan diadakannya kebijakan tersebut, Universitas Airlangga akan memiliki bank proposal , dan secara tidak langsung akan membantu Universitas Airlangga pada saat Pimnas.

Mempersiapkan Universitas Airlangga untuk menghadapi Pimnas ke -28 bukan hanya tugas Direktur Kemahasiswaan pada tingkat Universitas, namun juga harus didukung oleh kebijakan dari fakultas. Munir, Kasubag Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga juga mengatakan bahwasanya fakultas telah memiliki program-program untuk mendukung kebijakan Universitas dalam rangka menumbuhkan budaya menulis, hal tersebut diharapkan dapat membantu Universitas Airlangga dalam persiapan Pimnas ke- 28 maupun Pimnas tahun-tahun mendatang.

"Fakultas harus terus berusaha untuk melaksanakan program-program yang bisa menumbuhkan budaya menulis di kalangan mahasiswa, seperti Pelatihan Kepenulisan Ilmiah, Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Kompetisi Penulisan Mahasiswa (KPM)". Munir juga berpendapat bahwa Universitas dirasa perlu untuk memasukkan mata kuliah wajib tentang PKM dan kewirausahaan pada semua fakultas di Universitas Airlangga, seperti yang telah diterapkan di beberapa fakultas eksak.

Program kerja untuk meningkatkan prestasi Universitas Airlangga dalam Pimnas bukan hanya dilakukan oleh Dirmawa Universitas Airlangga dan Kemahasiswaan Fakultas, tetapi juga oleh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di bawah Kemahasiswaan, yakni Forum Keilmuan Garuda Sakti Unair.

Pada pertengahan September 2014 lalu, Garuda Sakti (sebutan Forum Garuda Sakti) telah melaksanakan dua kali *workshop* PKM dengan menggandeng BEM Unair dan IKA Pimnas. Bukan hanya *workshop*, Garuda Sakti juga membuat posko konsultasi seputar PKM hingga mendampingi mahasiswa peserta PKM dari mulai pembuatan proposal sampai pada Pimnas.

Dengan adanya gotong-royong ketiga pihak di atas, Universitas Airlangga diharapkan mampu mendapatkan tempat yang lebih baik untuk Pimnas ke-28 mendatang. Pimnas bukan hanya mengenai kebanggaan sebuah Universitas pada level Nasional, namun juga merupakan sarana pewujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada masyarakat.

Dengan itu, Unair sebagai salah satu perguruan tinggi tersohor di Indonesia diharapkan mampu menyumbangkan karya-karya mahasiswanya pada Pimnas ke-28 mendatang. **(shn)**

SOLUSI BERNAMA "FAKULTAS VOKASI"

Pendirian Fakultas Vokasi masih belum sepenuhnya siap. Beberapa perbaikan harus terus dilakukan

Jalur pendidikan Diploma III (D3) memang tidak seperti Sarjana 1 (S1). Perbedaan dasar ini terkadang menjadikan program studi (D3) mendapat perlakuan berbeda dengan S1. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Unair baru-baru ini membuat suatu kebijakan baru yaitu membentuk Fakultas Vokasi yang merupakan gabungan dari 18 program studi Diploma III (D3) dengan tambahan 3 program studi Diploma IV (D4).

Pembentukan fakultas ini sudah dipersiapkan sejak tiga bulan lalu sebelum awal kuliah berlangsung per 1 September 2014. Persiapan yang dilakukan diantaranya, pembentukan jajaran fakultas seperti penunjukan Dekan pertama, Dr.Dian Agustia SE, Msi Ak, Wakil dekan, sekretaris, bagian kemahasiswaan, bagian sarana dan prasarana, bagian keuangan, bagian akademik dan lain sebagainya.

Mengutip pernyataan Wakil Rektor I Unair, Prof. Dr. H. Achmad Syahrani Ms, Apt disela-sela pelantikan sekolah beberapa bulan yang lalu bahwa kebijakan ini bukanlah upaya penggabungan seluruh program diploma III saja, akan tetapi peningkatan program. Disamping itu, Kepala Pusat Informasi Studi dan Humas, Dr. MG. Bagus Ani Putra, Psi, menambahkan bahwa program studi (prodi) diploma tersebut ditingkatkan menjadi diploma 4 (setara Sarjana-1), Magister terapan dan Doktor terapan. "Prodi D-3 yang sudah siap menjadi D-4 atau yang setara S-1 ada tiga yakni batra (pengobatan tradisional), radiologi dan fisioterapi. Kalau D-4 sudah ada, maka alih jenis atau alih jenjang program studi akan ditiadakan." tuturnya.

Prodi yang terdapat dalam Fakultas Vokasi ini digolongkan menjadi tiga kategori yakni, Departemen Kesehatan, Teknik dan Bisnis. Untuk D3 Departemen Kesehatan yaitu, Analisis Medis, Fisioterapi, Radiologi, Kesehatan Gigi, Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Kesehatan Ternak, Pengobatan Tradisional. Sementara itu program studi D4 dalam departemen ini ialah Fisioterapi, Radiologi dan Pengobatan Tradisional. Untuk Departemen Teknik sendiri terdapat tiga prodi yakni, Sistem Informasi, Otomasi Sistem Instrumentasi dan Teknisi Perpustakaan. Sementara untuk Departemen Bisnis terdiri atas Perpajakan, Akutansi, Kepariwisataan, Bahasa Inggris, Manajemen Pemasaran, Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran, Manajemen Perhotelan dan Manajemen Perbankan.

Menurut Kasubag akademik Fakultas Vokasi, Bapak Saiful Bachri disela-sela wawancara dengan salah satu kru LPM Mercusuar (25/9), ia menyebutkan bahwa penyatuan prodi D3 ini merupakan wujud integrasi pelayanan manajemen mahasiswa D3. Merupakan hal yang tidak mudah menyatukan berbagai prodi D3 dari berbagai fakultas yang ada di Unair ini. Oleh karena itu dalam urusan pemisahan *database* akademik akan dibantu oleh Direktorat Sistem informasi Unair. Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya fasilitas kelas yang ada di Fakultas Vokasi yang menyebabkan sebagian proses kuliah tetap diadakan di Fakultas Vokasi, dan sebagianya lagi di fakultas asal untuk materi tertentu sperti praktikum, ditambah lagi dengan pemusatan beberapa mata kuliah wajib umum (MKWU) seperti Agama di Pusat Bahasa. Hal ini ditujukan kepada mahasiswa D3 agar mereka tidak hanya tahu fakultas asalnya saja, akan tetapi mereka juga tahu kantor manajemenya yang ada di jalan Srikana tersebut. Adapun kendala lain dalam urusan akademik yaitu status mahasiswa itu sendiri, untuk mahasiswa yang akan wisuda, transkip kelulusan mereka masih diurus oleh fakultas asal, sedangkan sisanya diurus oleh Fakultas Vokasi.

Sementara itu, bagian sarana prasarana, Bapak Darto Utomo juga menambahkan bahwa kendala yang ada di Fakultas Vokasi saat ini masih berurusan dengan tempat kuliah. Maklum saja jika koordinasi waktu yang ada terkadang bermasalah lantaran mahasiswa yang diurus merupakan mahasiswa dari fakultas yang terpisah dari kampus A, B dan C.

Dengan adanya Fakultas Vokasi ini, ada beberapa hal yang menjadi fokus utama kontribusi Unair di dunia pendidikan. Pertama, Fakultas Vokasi memfokuskan pada praktik. Apabila dalam prodi regular 60 persen teori dan 40 persen praktik, maka berbeda halnya dengan vokasi dengan 60 persen praktik dan 40 persen teori dan prodi profesi merupakan pendidikan pasca-sarjana, sehingga sifatnya akan 100 persen praktik. Kedua, mempersiapan mahasiswa vokasi yang terampil dan benar-benar siap dalam menghadapi persaingan khususnya di Asean Community 2015. **(ahl)**

GONJANG-GANJING KIPEM

Peraturan yang masih terbilang baru ini mungkin memang sudah banyak dimengerti oleh warga, namun belum banyak yang mau mematuhinya. Berdasarkan Perda nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa warga pendatang di daerah Surabaya diwajibkan mengurus KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman). Tapi disamping itu banyak pula warga yang belum mengetahui dengan pasti apa yang dimaksud dengan KIPEM, apa tujuan diadakannya KIPEM dan bagaimana cara membuatnya.

KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) adalah semacam kartu tanda penduduk tambahan bagi warga luar kota yang tinggal "sementara" di kota lainnya. "Sementara" yang dimaksud disini adalah tidak permanen, misalnya hanya beberapa bulan atau beberapa tahun. Biasanya warga luar kota yang melakukan migrasi non-permanen itu merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, atau bekerja.

Persyaratan untuk membuat KIPEM sebenarnya tidak terlalu susah, berdasar Perda Kota Surabaya nomor 5 tahun 2011 persyaratannya adalah:

- KTP;
- Surat Pernyataan mengenai Jaminan Tempat Tinggal dari Kepala Keluarga yang akan ditumpangi, dan diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
- Surat Pernyataan/Keterangan Jaminan Pekerjaan/Studi

Kota Surabaya yang notabene merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta juga ikut menetapkan aturan bahwa siapapun yang tinggal di Surabaya lebih dari tiga bulan wajib memiliki KIPEM. Pengecekan adanya KIPEM ini dilakukan dengan operasi yustisi yang melibatkan Satpol PP dan dilakukan secara berkala, tujuan utamanya adalah rumah kos, terutama yang berada di area perguruan tinggi atau area industri.

Operasi yustisi yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya merupakan bagian dari upaya pengendalian penduduk di Kota Surabaya sekaligus penegakan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyeleggaraan Administrasi Kependudukan.

Korban yang terjaring operasi yustisi harus rela KTP-nya disita oleh petugas dan diwajibkan untuk mengambil kembali di hari kerja di Polsek Tambak Sari. Indri, salah seorang mahasiswa yang menjadi korban dalam operasi yustisi menceritakan bahwa pengambilan KTP pun tidak bisa diambil secara langsung. Pengambilan KTP harus diambil sesuai prosedur yang ada dan menunggu putusan hakim.

Cukup banyak korban yang terjaring operasi yustisi, termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang bekerja dan memaksakan izin untuk datang kesana mengambil KTP. Beberapa ibu mengeluhkan hakim yang datang terlambat sehingga mereka harus bolos dari kantor karena mereka merasa membuang-buang waktu untuk menunggu hakim datang. Disamping itu, denda yang ditetapkan untuk warga yang tidak memiliki Kipem berkisar antara 50.000-100.000 sehingga mungkin masih banyak warga yang menyepelekannya dan lebih memilih membayar denda.

Selain itu, menurut Kadek, korban lain yang terkena operasi yustisi, ia mengatakan bahwa sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk menghindari operasi yustisi, misalnya berdiam di dalam kamar dan pura-pura tidak ada di kost. Apalagi menurutnya ketidakadilan terjadi karena hanya rumah kost tertentu yang didatangi oleh satpol PP.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Wirawan selaku dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, beliau menyatakan bahwa KIPEM sebenarnya merupakan pendataan warga pendatang yang bertujuan agar Pemerintah Kota dapat memperkirakan jumlah APBD yang harus dianggarkan untuk warga pendatang. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa warga pendatang tentu saja ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kota Surabaya, seperti misalnya air, listrik, halte bus, dan lain-lain. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya harus bisa menganggarkan dengan tepat sehingga jangan sampai orang asli Surabaya tidak bisa ikut menikmati fasilitas yang seharusnya didapatkan. Namun, menurut beliau, operasi yustisi yang dilakukan secara berkala untuk memeriksa apakah warga pendatang sudah memiliki Kipem dianggap kurang efektif, sebab tidak mungkin jumlah satpol PP yang hanya beberapa saja dapat melakukan operasi yustisi di seluruh kota Surabaya yang luas ini.

Beliau juga menambahkan bahwa ada cara lain yang menurutnya lebih efektif untuk melakukan pendataan warga pendatang, yakni dengan memanfaatkan Ketua RT/RW setempat untuk melakukan pendataan terhadap warganya setiap hari secara *online*. Alangkah baiknya apabila pemerintah mengalokasikan dana untuk pembelian PC bagi tiap RT sehingga pendataan kependudukan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien **(ind)**

Fasilitas Mulus, Cepat Lulus

Krisna Indrawan Pratama*

Pada tahun ajaran baru 2014/2015 ini, tempat parkir menjadi sorotan utama para *customer* jasa pendidikan – mahasiswa Universitas Airlangga. Kurangnya lahan parkir di kawasan Kampus A dan B yang terbatas nan padat ternyata memberikan sumbangsih bagi ketidaknyamanan kegiatan perkuliahahan mahasiswa. Para mahasiswa pengguna sepeda motor harus rela parkir jauh dari gedung perkuliahan dan tak jarang memadati lalu lintas kampus.Sementara untuk mahasiswa pengguna mobil harus rela untuk mengitari wilayah kampus demi sepetak lahan parkir. Jika tidak beruntung, terkadang pengguna mobil harus rela parkir di lahan parkir terdekat diluar kampus dan dalam kondisi ekstrim, mahasiswa terpaksa harus pulang dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan hanya karena keterbatasan lahan parkir.

Kondisi kelangkaan parkir sebenarnya tidak terjadi pada tahun ini saja. Faktanya, seiring dengan penambahan jumlah kuota mahasiswa baru disetiap fakultas per tahunnya, parkir menjadi permasalahan khas yang terjadi di awal tahun ajaran baru sejak tiga tahun yang lalu. Hanya saja, tahun ini mencapai kondisi yang paling buruk. Padahal jika Unair ingin meningkatkan kualitas jasa pendidikan yang ditawarkan, penambahan kuota mahasiswa baru harus seiring seirama dengan penambahan berbagai macam fasilitas, tidak hanya sekedar lapangan parkir.

Sumber permasalahan kelangkaan lahan parkir di kawasan Kampus A dan B disebabkan oleh kesalahan perhitungan otoritas Unair terhadap jumlah masuk dan keluarnya mahasiswa Unair. Tahun ini, menurut Direktorat Sumber Daya Unair, jumlah mahasiswa S1 dan S2 yang masuk menyentuh angka 7000 mahasiswa sementara jumlah mahasiswa yang keluar kurang dari setengah jumlah total. Fakta ini juga didukung oleh kurangnya pembangunan lahan parkir di kawasan Kampus A dan B. Otoritas Unair sejatinya telah menyiapkan rencana pembangunan gedung parkir sejak lama hanya saja belum terealisasikan hingga kini. Pembangunan gedung parkir tentu saja menghabiskan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, satu-satunya solusi jangka pendek yang dapat Unair lakukan adalah memanfaatkan lahan-lahan yang tidak dan belum digunakan seperti penggunaan lahan Syariah Tower – yang akan dijadikan lahan parkir per 1 Oktober 2014- serta kawasan Perumahan Dosen yang telah ditinggalkan. Kedepannya, otoritas Unair tentu harus mengkaji kembali pembangunan gedung parkir yang belum terealisasi dan semoga berlanjut ke tahap pembangunan.

Tidak hanya keterbatasan lahan riil, lahan informasi dan pengetahuan juga masih terbatas. Padahal salah satu fasilitas yang menjadi dambaan mahasiswa dan dosen adalah akses untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Pemberian materi kuliah di kelas tentu akan lebih menarik dan menambah bobot pengetahuan ketika presenter –baik mahasiswa dan dosen mampu memberikan contoh kasus secara instan di tengah perkuliahan untuk meningkatkan gairah diskusi. Kegiatan ini tentu saja membutuhkan akses internet yang cepat dan stabil.

Berkaitan dengan informasi dan pengetahuan, sudah seharusnya Unair menambah langganan *e-Journal* seperti JStor, Taylor and Francis (TAND) dengan berbagai kajian studi yang merata. Lebih hebat lagi jika Unair membangun *hotspot* Internet cepat dan stabil yang mampu menunjang mahasiswa dalam mengakses *e-Journal* dikawasan kampus tanpa harus ke perpustakaan, tanpa harus menggunakan komputer atau laptop, cukup dengan *gadget* milik mahasiswa dan dosen. Selama berlangganan *e-Journal*, perpustakaan sudah seharusnya mengunduh seluruh jurnal yang tersedia dan menyimpannya kedalam *database* perpustakaan elektronik Unair sehingga perpustakaan Unair kaya akan berbagai pengetahuan yang *up-to-tade* serta dapat diakses mahasiswa Unair. Ketika fasilitas akses informasi dan pengetahuan yang terpenuhi, tentu jumlah mahasiswa yang keluar karena meraih gelar sarjana dan master meningkat. Peningkatan kelulusan juga berpengaruh terhadap permasalahan parkir di Unair dikarenakan terdapat rasio yang tepat untuk jumlah mahasiswa masuk dan keluar setiap tahunnya.

***Ketua HIMA HI 2014**

Sambungan hal 1 ....

Masalah lahan parkir ternyata tidak terjadi di kampus C, keadaannya relatif lebih sepi dari yang lain. Selain lahan kampus yang sangat luas, letaknyapun tidak terlalu berdekatan dengan pusat kota. Selain itu, banyak fakultas yang sudah diperluas lahan parkirnya.

Menurut Punari, Kasubag Prasarana sulitnya mencari parkir disebabkan pertama karena lahan Unair memang terbatas dan mahasiswa semakin banyak membawa mobil. Kedua karena sekarang sedang terjadi pembangunan di beberapa tempat. Seperti pembangunan parkir bertingkat di sebelahnya FEB dan pembangunan lift FH juga menambah penuhnya parkir. Yang ketiga dibangunnya jalan aspal di sebelah timur FISIP diakuinya juga mengganggu. Disinggung mengenai tidak seimbangnya jumlah mahasiswa masuk dan keluar sebagai salah satu penyebab , beliau pun menyetujui. "Bisa jadi karena jumlah diterima dan lulus tidak sebanding" ujarnya

Untuk mengatasi masalah tersebut Direktorat Sumberdaya berencana membuka lahan syariah tower untuk parkir sementara. Efektif mulai 1 Oktober kebijakan ini mempunyai risiko keamanan. Pembangunan yang masih terus berlangsung akan sedikit membahayakan mahasiswa ketika terjadi hal-hal tidak terduga. "Keselamatan nanti masih diupayakan, kita bersihkan dulu, kita atur tempatnya, untuk keselamatan ya formalnya *kayak* apa kebijakan pak direktur sumber daya" ujar beliau.

Selain membuka lahan, Direktorat Sumberdaya juga berencana untuk membuka rumah-rumah dinas yang kosong. Diantaranya rumah dinas nomor 1A, 2,4, dan 6 akan digusur untuk dibuat lahan parkir sementara.

Sementara itu permasalahan parkir di Kampus A sendiri menurut Punari belum ada penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan alasan klise yaitu lahan kampus A memang sempit. Selain itu bertambahnya jumlah mobil juga semakin menambah rumit persoalan.

Selain dari Direktorat Sumberdaya yang mengurus sarana prasarana, Direktorat Kemahasiswaan juga telah melakukan usaha untuk mengatasi masalah parkir ini. Melalui surat edaran nomor 9989/UN3.4/KM/2014 mahasiswa baru dilarang untuk membawa mobil selama empat semester. Lebih jelas dalam poin ke 3 surat edaran tersebut dituliskan "selama perkuliahan empat semester, mahasiswa tidak diperbolehkan membawa kendaraan roda empat (mobil) mengingat masing-masing fakultas mengalami kekurangan lahan parkir".

Peraturan ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Yang membedakan peraturan dulu dan sekarang adalah jangka waktu pelarangan ditambah dari dua semester menjadi empat semester. "Sekarang saya tambahi empat semester ndak boleh bawa mobil" ujar Dirmawa, Eko Supeno ketika diwawancarai pertengahan September.

Sayang peraturan ini sendiri tidak mengikat dan terkesan sebatas himbauan saja. Eko Supeno, selaku Dirmawa mengatakan bahwa beliau memang agak kesulitan dalam menjaga regulasi tersebut. Pintu *security* tidak memungkinkan untuk memeriksa satu persatu KTM mahasiswa. Menyeleksi mahasiswa mana yang masih semester awal dan akhir pasti membutuhkan waktu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan antrian. Selain itu regulasi ini juga belum memiliki implikasi hukum. "Larangan itu sebetulnya baru efektif kalo ada sanksi hukum, memang di dalam regulasi hanya baru pada sifat melarang" ungkapnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut Eko Supeno sendiri mengharapkan ada kesadaran kolektif dari semua pihak. Ia merasa tidak mampu jika harus berjalan sendiri. " Kalo ada yang bisa memberi solusi, segera *tak gawe* surat, karena saya tidak akan mampu" ujarnya. Beliau juga mengharapkan proyek syariah tower segera diselesaikan karena salah satu gedungnya direncanakan dibangun lahan parkir tujuh lantai. Ketika pembangunan ini selesai tentu saja akan sangat membantu dalam mengatasi masalah padatnya lahan parkir di Kampus B. **(rpd)**

Survei Kepadatan Parkir

Kendaraan yang Digunakan

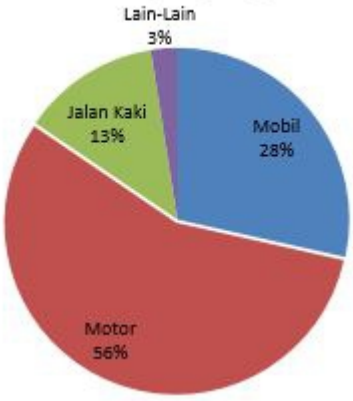

Alasan Kendaraan

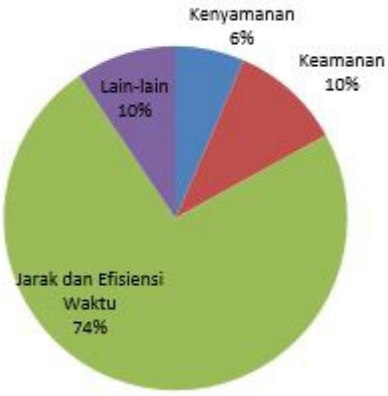

Penyebab

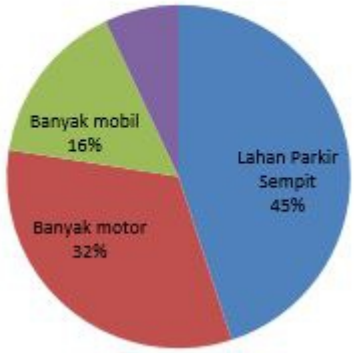

Solusi

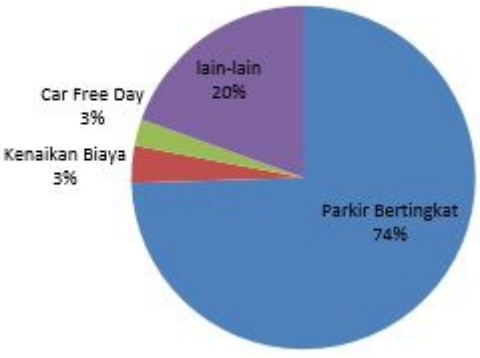

Sumber : Litbang LPM Mercusuar